PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

URGENSI PERLUASAN *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:
ERVINA HASAN
NIM : 271414136

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum	**Novendri M. Nggilu, SH.,MH**
Nip.19540625 198102 1 001	**Nip.19891127 2014104 1 001**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

URGENSI PERLUASAN *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh
ERVINA HASAN
NIM : 271414136

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji
Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Juli 2018
Pukul : 10.00 – 11.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **DR. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH.** (.....)
   Nip. 19810306 200812 2 001
2. **Zamroni Abdussamad, SH.,MH.** (.....)
   Nip. 19700712 200312 1 002
3. **Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum** (.....)
   Nip. 19540625 198102 1 001
4. **Novendri M. Nggilu, SH., MH.** (.....)
   Nip. 19891127 201404 1 001

Gorontalo, 25 Juli 2018
Mengetahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

ERVINA HASAN (271414136), Urgensi Perluasan *Legal Standing* Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi dibawah bimbingan Bapak Johan Jasin sebagai Pembimbing I dan Bapak Novendri M. Nggilu sebagai pembimbing II.

Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi *legal standing* pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada pemerintah saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi peluasan *legal standing* pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, dan mengkonstruksi pengaturan *legal standing* pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *legal standing* yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan aspek ilmiah dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dimana mulai dari teori kedaulatan rakyat, asas *equality before the law*, teori negara hukum, dan beberapa pendekatan lainnya diketahui bahwa pemberian *legal standing* yang hanya diberikan kepada pemerintah terbukti menuai banyak masalah dan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Konstitusi bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat. Maka dari itu perlu adanya upaya merevitalisasi masalah ini dengan merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan cara memberikan *legal standing* kepada rakyat yang memenuhi prosedural *class action* (gugatan perwakilan).

Kata Kunci:
Legal Standing, Partai Politik, Pembubaran, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

HASAN, ERVINA (271414136), The Urgency of The Extension of Legal Standing in the Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court. Principal Supervisor: Johan Jasin. Co-Supervisor: Novendri M. Nggilu.

This research discusses and criticizes the legal standing in the dissolution of political parties by the Constitutional Court (henceforth called as MK) that is only given to the government. The purpose of this research is to analyze the urgency of the extension of legal standing in the dissolution of political parties by MK as well as to construct the arrangement of legal standing in the aforementioned case. This normative study employed laws, regulation, and conceptual approaches.

The result concludes that legal standing provided only to the government is not in accordance with the scientific aspects and Indonesia's current constitutional requirements. From the theory of sovereignty, the principle of *equality before the law*, the theory of law country, and other approaches, it is found that the provision of legal standing to the government accepts a lot of problems and is not in compliance with the mandate by the Constitution that Sovereignty is in the hands of the People. For that reason, it needs an effort to revitalize such problems by revising Article 68 of Constitutional Court Law by providing the legal standing to people who meet the class action procedures.

Keywords:
Legal Standing, Political Parties, Dissolution, Constitutional Court

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION